BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah seperangkat nilai yang berasal dari Barat yang menghasilkan sistem politik yang telah dipraktekkan di sejumlah negara. Demokrasi dinilai sebagai suatu tipe ideal sebuah sistem politik. Menurut Schumpeter dalam karya besarnya *Capitalism*, *Socialism*, *and Democracy*. Demokrasi adalah sebuah sistem persaingan yang terbuka dan *fair* di kalangan elite politik untuk mendapatkan kekuasaan. Rakyat merupakan hakim terakhir yang memutuskan siapa yang akan memerintah mereka. Dengan demikian, para elite yang bersaing tersebut memainkan permainan politik, pola hubungan diantara keduanya diteguhkan melalui mekanisme pemilu yang jujur dan terbuka.[1]

Sedangkan Robert Dahl lebih memilih menggunakan kata '*polyarchy*' daripada demokrasi. Robert Dahl menggunakan kata '*polyarchy*' untuk merujuk sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi: kompetisi yang luas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok, seperti partai politik; partisipasi politik untuk memilih pemimpin dan kebijakan; dan tingkat kebebasan sipil dan politik.[2] Dari definisi yang dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert Dahl,

[1]"*Dari langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan"*, http://books.google.co.id/books?isbn=9799101425 (akses 13 Februari 2014).

demokrasi memiliki dua dimensi yaitu persaingan dan partisipasi yang dinilai oleh Dahl dan Schumpeter sebagai bagian penting dalam demokrasi. Hal ini bermakna adanya pengaturan institusional dalam proses politik di mana pihak-pihak yang ingin memperoleh jabatan atau kekuasaan harus memperolehnya melalui perjuangan yang kompetitif untuk memenangkan suara masyarakat melalui pemilihan umum.[3]

Pemilihan Umum merupakan instrumen demokrasi untuk memilih secara langsung wakil rakyat yang akan menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai arena kontestasi untuk memilih wakil rakyat yang jumlahnya sangat terbatas, dan berbanding terbalik dengan banyaknya peserta pemilihan umum. Partai politik dan perseorangan sebagai peserta pemilu akan menghalalkan berbagai strategi untuk mendulang suara. Salah satunya melakukan serangkaian agenda politik untuk menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan politik agar memberikan dukungan suaranya dalam pemilihan umum. Hal ini dilakukan karena karakteristik di dalam kontestasi politik menyebabkan kompetisi menjadi

---

[2]Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali* (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 16.

[3]*Ibid*.

vis-à-vis yaitu ada pihak yang menang dan mendapatkan kekuasaan serta terdapat pihak yang kalah yang kemudian harus berada di luar kekuasaan.

Salah satu kekuatan politik yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh para peserta pemilihan umum untuk meraup suara adalah Organisasi Masyarakat Sipil. Kekuatan organisasi masyarakat sipil ini terletak pada jumlah massa yang riil hingga tingkat akar rumput. Maka tidak mengherankan apabila kemudian peserta pemilu menggunakan strategi untuk mendekati organisasi masyarakat sipil dengan menjalin deal-deal politik. Hal ini yang akhirnya menyeret keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum agar memobilisasi dan mengamankan suara dari massa yang dimiliki organisasinya.

Padahal seyogyanya, organisasi masyarakat sipil/*civil society* sebagai salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad AS Hikam harusnya memiliki kemandirian (*autonomy*) tinggi yang ketika berhadapan dengan negara serta bercirikan kesukarelaan (*voluntery*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), serta keterikatan dengan norma-norma atau nilai hukum yang dipatuhi oleh warganya.[4]

Serta berfokus dalam konteks pembuatan kebijakan publik seperti advokasi atau lobi terhadap isu yang sedang dibahas dalam proses pembuatan undang-undang. Dalam konteks ini, *civil society* sebagai kelompok kepentingan

---

[4]Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 224.

yang akan melobi partai politik di DPR RI/DPRD untuk mendorong dan mendiskusikan kepentingan yang mereka ajukan. Sebagai organisasi yang independen dari kepentingan politik, *civil society* juga memiliki peran untuk memonitor janji-janji kampanye para kandidat dan partai dalam masa kampanye serta perilaku para politisi di DPR. Dalam kesempatan yang berbeda, *civil society* juga dianggap sebagai wadah untuk berdiskusi tentang berbagai hal-hal penting terkait dengan isu-isu yang mereka butuhkan saat itu.[5]

Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan perempuan Surabaya yang berkualitas dan bebas dari kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan serta sejahtera lahir batin, yang dijiwai nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah. Organisasi sosial keagamaan ini mengklaim memiliki jumlah anggota kurang lebih 10.000 hingga tingkat ranting (desa).

Sebagai sebuah Badan Otonom NU yang seharusnya independen dan netral, tidak menjadikannya terlepas sama sekali dalam dinamika kontestasi politik nasional. Hal ini karena dengan jumlah massa yang tidak sedikit mengakibatkan organisasi sosial keagamaan ini berada pada posisi tawar menawar yang tinggi dan diperebutkan karena kemampuannya untuk memobilisasi dukungan suara dari massa yang dimiliki untuk meloloskan peserta pemilu mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan.

---

[5] *Ibid*.

Seperti yang terlihat dalam pemilihan umum 2014, keberadaan Fatayat NU Cabang Kota Surabaya yang seharusnya otonom harus terlibat secara aktif untuk memobilisasi massa yang dimilikinya untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif di Dapil Jawa Timur 1 yaitu Fandi Utomo yang berasal dari Partai Demokrat. Bukan hanya dalam Pemilihan Umum 2014, dukungan kepada Fandi Utomo juga pernah diberikan ketika menjadi calon Walikota Surabaya (cawali) pada Pemilihan Walikota Surabaya tahun 2010. Dengan harapan Fandi Utomo menjadi partner untuk mengegoalkan berbagai program kerja organisasi ini. Selain itu, Fatayat NU Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 juga mengatakan kesiapannya untuk memberikan sosialisasi dan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan nomer urut dua yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dengan demikian di dalam Pemilihan Umum 2014 baik itu Pemilihan Umum Legislatif di Dapil Jatim 1 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kecenderungan bahwa Fatayat NU Cabang Kota Surabaya berafiliasi dengan partai politik yang berideologi nasionalis. Padahal sebagai Badan Otonom yang berada di bawah struktur organisasi NU seharusnya membuat Fatayat NU Cabang Kota Surabaya memberikan pilihan politik yang sama dengan himbauan yang telah dikeluarkan oleh Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU untuk memilih Partai Kebangkitan Bangsa di Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Adanya kewajiban untuk mematuhi ini dikarenakan komunikasi di dalam NU tidak berlangsung dua arah. Komunikasi khas NU hanya berlangsung satu

arah (*one-way-communication*). Selain itu, di dalam tradisi NU terdapat ketergantungan amat tinggi pada kepemimpinan seorang tokoh (kyai) sebagai panutan. Mereka bergantung pada kyai, bukan saja hendak memilih jalan (ibadah) untuk menuju Tuhan-nya, melainkan juga saat memilih jalan (politik) untuk membangun dunianya, membangun masyarakat dan negaranya.

Seperti yang dikutip dari salah satu situs online, himbauan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj yang mewajibkan seluruh pengurus dan anggota Fatayat NU untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 karena,[6] *Pertama*, PKB merupakan satu-satunya partai yang dilahirkan oleh NU untuk memperjuangkan aspirasi warga nahdliyin.

Kedua, KH Said Aqil Siroj merupakan salah satu pendiri PKB, beliau merupakan salah satu anggota Tim Lima yang dibentuk asas keputusan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998. *Ketiga*, dukungan yang diberikan oleh NU kepada PKB merupakan keputusan yang didasari oleh adanya muktamar NU di Lirboyo tahun 2000 dimana didalam keputusan tersebut PBNU tetap memberikan dukungan untuk PKB. PKB merupakan kepanjangan NU dibidang politik. *Keempat*, PKB merupakan satu-satunya partai politik yang kinerjanya di dalam parlemen bersinergi dengan PBNU.

---

[6]"*Said Aqil ajak Fatayat NU besarkan PKB*", AntaraNews, antaranews.com/berita/359708/said-aqil-ajak-fatayat-nu-besarkan-pkb (akses 24 Desember 2014).

Bukan hanya Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Fatayat NU yaitu Drs. Hj. Ida Fauziyah juga mengharapkan pengurus dan anggota Fatayat NU untuk mendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilihan umum 2014. Dukungan ini diberikan karena menurutnya tidak ada satupun partai politik yang memiliki respek dan komitmen kepada NU, hanya partai PKB saja yang memberikan konstribusi materiil dan non materiil kepada PBNU dan Banom NU.[7]

Kontribusi yang dimaksudkan adalah bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anak kandung NU memberikan kontribusi materiil untuk kebutuhan operasional dan kegiatan kepada PBNU secara berkala. Selain itu, PKB secara internal selalu mengkonsultasikan setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas, suara NU adalah suara PKB di parlemen. Oleh karena itu, dalam pemilihan umum 2014 ini menurut Ketua Umum PP Fatayat NU adalah momentum untuk *ahlusunnah wal jamaah* karena dengan menempatkan kader terbaik NU di posisi strategis dapat melahirkan kebijakan dan kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, himbauan juga dikeluarkan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dukungan ini diberikan karena menurutnya sosok Prabowo memiliki ketegasan,

---

[7]"*Selamatkan Aswaja Warga NU Wajib Dukung PKB*", http://m.pkb.or.id/selamatkan-aswaja-warga-nu-wajib-dukung-pkb (akses 24 Desember 2014).

keberanian, dan keinginan untuk memajukan dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berubahnya afiliasi politik Fatayat NU Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum 2014 ke partai politik yang berideologi nasionalis menandakan bahwa saluran-saluran aspirasi masyarakat nahdliyin tidak hanya terbatas pada salah satu partai politik saja yaitu PKB. Tetapi telah menyebar ke berbagai partai politik sesuai dengan arah kepentingan politik organisasi masyarakat sipil tersebut.

Bukan hanya dalam Pemilihan Umum 2014, terpecahnya suara warga nahdliyin juga dapat dilihat pada pemilihan umum 1999, dengan muncul partai-partai politik yang masing-masing mengklaim memiliki basis warga NU antara lain Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang didirikan oleh Yusuf Hasyim, Partai Nahdlatul Umat (PNU) yang didirikan oleh Syukron Ma'mun, dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Partai SUNI) yang didirikan oleh Abu Hasan, yang seluruhnya lahir setelah PKB.[8]

Keempat partai politik yang masing-masing mengklaim memiliki basis warga NU tersebut dalam kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam garis perjuangan dan *platform* partai. PKB misalnya, memiliki asas Pancasila dan secara tegas bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka bagi siapa saja, dalam artian lintas agama, suku, dan golongan. Sedangkan Partai

[8]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), h. 167.

SUNNI, meskipun berasas pancasila, namun dalam sejarahnya ia lahir dan didirikan oleh Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU), yaitu pengurus Besar NU tandingan yang sejak Muktamar ke-29 di Cipasung Jawa Barat merupakan pesaing utama kubu Abdurahman Wahid. Adapun dua partai lainnya, yakni PKU dan PNU memilih menggunakan asas Islam meskipun masih mencantumkan Pancasila sebagai asas tambahannya. Kedua partai terakhir ini juga dianggap oleh sebagaian kecil warga NU lebih mewakili tradisi keagamaan NU karena dalam asas partainya ditambahkan kata *Ahlussunnah waljama'ah* (*Aswaja*).[9]

Selain itu di era Orde Baru, suara nahdliyin juga harus terpecah ke Partai Golkar karena banyaknya anggota NU termasuk Fatayat NU Cabang Kota Surabaya yang menjadi PNS diwajibkan untuk memberikan dukungan ke partai ini dan PPP karena adanya penggabungan paksa empat partai islam yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia (PARMUSI), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Partai ini dibentuk dengan tujuan "mempertahankan dan membangun negara RI atas landasan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT".[10]

---

[9]Fathurin Zen, *NU Politik Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), h. 40-41.

[10]Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara Yogyakara, 2008), h. 156.

Sekedar mengulas secara singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu yakni penelitian dari M. Reza Yudistira[11] dalam penelitiannya yang bertema Afiliasi Pilihan Warga NU Surabaya Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 Putaran Kedua memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi afiliasi politik warga NU diantaranya adalah faktor pola patronase politik (pola hubungan patron klien yang khas pada tubuh NU), sosial ekonomi, jenis kelamin, latar belakang NU yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan, konflik internal di tubuh PKB.

Sementara M.Faridz Afif[12] dalam skripsinya yang berjudul Afiliasi Politik Gerakan Pemuda Ansor dalam Pemilihan Gubernur 2008 di Jawa Timur memberikan kesimpulan bahwa yang mempengaruhi afiliasi politik Gerakan Pemuda Ansor antara lain adalah kepentingan dari anggota GP Ansor yang beragam, ikatan emosional dari patron dengan klien, konflik yang berkepanjangan ditingkat pusat yang mempengaruhi sampai di daerah-daerah.

Lain halnya dengan Rahmad Harianto[13] yang mencoba mengungkapkan adanya pergeseran afiliasi politik kyai dan santri pada Pemilu 1999, dalam

---

[11]Reza Yudistira, "*Afiliasi Pilihan Warga NU Surabaya Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 Putaran Kedua*", (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2009).

[12]Faridz Afif, "*Afiliasi Politik Gerakan Pemuda Ansor dalam Pemilihan Gubernur 2008 di Jawa Timur*", (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2008).

kesimpulannya menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran afiliasi politik di kalangan kyai dan santri di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Jombang pada Pemilu 1999. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang mendasari terjadinya pergeseran afiliasi politik tersebut antara lain, *Pertama*, adanya perubahan format politik, yakni adanya reformasi politik di Indonesia yang mengakibatkan munculnya partai politik baru ; *Kedua*, pandangan kyai terhadap fungsi partai dipandang sebagai alat dalam rangka mengembangkan dan memperjuangkan nilai-nilai agama Islam. Pergeseran di kalangan santri lebih pada pertimbangan emosional dan ikatan historis sebagai warga NU disamping adanya figur kepemimpinan Gus Dur yang kuat di kalangan santri dan warga NU yang dianggap sebagai Wali.

Tema yang hampir sama juga dipilih Derajat Wibisono[14] dalam penelitiannya yang berjudul Afiliasi Politik Kyai Pesantren, yang mengambil kesimpulan bahwa afiliasi politik kyai ternyata tidak serta merta diikuti santri. Hubungan antara kyai dengan santri yang semula berlandaskan patronase yang merupakan basis kultural solidaritas di kalangan NU mulai melemah dan mencari bentuk baru yang didasarkan pada pertimbangan lebih rasional. Sebagai kekuatan sosial, santri mencair bersama semakin pudarnya ikatan emosional keagamaan.

---

[13]Rahmad Harianto, "*Kyai Santri dan Pemilu 1999 : Deskriptif tentang Pergeseran Afiliasi Politik Kyai dan Santri pada Pemilu 1999 di Pesantren Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang*", (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2002).

[14]Derajat Wibisono, "*Afiliasi Politik Kyai Pesantren : Studi Kasus Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Afiliasi Politik Kyai Pesantren pada Pemilu Presiden Tahap 1 di Kabupaten Sidoarjo*", (skripsi, Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, 2005).

Setelah melihat secara seksama berbagai penelitian terdahulu, maka penulis merasa perlu untuk mengambil celah dari sekian banyak penelitian seputar afiliasi politik tersebut. Penulis kiranya merasa tertarik untuk mengambil tema seputar Kontestasi Politik dan Afiliasi Politik yang terjadi di dalam organisasi masyarakat sipil yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya sebagai salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 2014. Pada tema penelitian ini penulis merasa perlu untuk mengetahui tentang bagaimana penentuan arah afiliasi politik ditentukan oleh Fatayat NU Cabang Kota Surabaya, mengapa terjadi perubahan afiliasi politik ke partai politik yang berideologi nasionalis serta implikasinya dengan adanya perubahan afiliasi politik tersebut terhadap Fatayat NU Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum 2014.

Masalah ini menjadi menarik untuk diangkat karena mengingat Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya merupakan badan otonom NU yang beranggotakan perempuan muda NU. Dimana walaupun organisasi tersebut merupakan sebuah badan yang berdiri sendiri tetapi bukan berarti terlepas dari NU. Karena terdapat kecenderungan bahwa sebagai badan yang berada dibawah naungan NU dan anggotanya secara keseluruhan perempuan tentu harus mematuhi semua himbauan yang telah dikeluarkan oleh kyai. Ini diakibatkan karena adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sosok kyai dalam menentukan arah politiknya. Tetapi, dalam fenomena di Pemilihan Umum 2014 ini terdapat kecenderungan yang berbeda dimana Fatayat NU Cabang Kota Surabaya memperlihatkan adanya perbedaan afiliasi politik dengan NU.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya menitikberatkan pada afiliasi politik dengan segala bentuk faktor-faktor yang menyertai adanya afiliasi tersebut. Jikalau ada penelitian yang mencoba mengungkapkan tentang adanya pergeseran-pergeseran afiliasi politik hanya terbatas pada mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya afiliasi politik tersebut dan belum menjelaskan dan mengungkapkan secara menyeluruh bagaimana proses terjadi perubahan afiliasi tersebut, dan implikasi dari adanya perubahan afiliasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa perumusan masalah merupakan pencerminan dari isi pokok yang dibahas di dalam penelitian ini, dan rumusan masalah berfungsi untuk menegaskan hal-hal utama dari suatu masalah. Maka berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, masalah penelitian yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan arah afiliasi politik ditentukan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya di Pemilihan Umum 2014?
2. Mengapa terjadi perubahan afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya ke partai politik berideologi nasionalis di Pemilihan Umum 2014?
3. Apa implikasi dari adanya perubahan afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya di Pemilihan Umum 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapa yang menjadi penentu dalam proses penentuan afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya di Pemilihan Umum 2014.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya ke partai politik yang berideologi nasionalis di Pemilihan Umum 2014.
3. Untuk mengetahui implikasi dari terjadinya perubahan afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya di Pemilihan Umum 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pada khususnya pada ilmu-ilmu pengetahuan sosial-politik yang memfokuskan kajiannya terhadap studi-studi yang berhubungan dengan Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk mengkaji permasalahan yang sama secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai bagaimana penentuan arah afiliasi politik ditentukan oleh Fatayat NU Cabang Surabaya di dalam Pemilihan Umum 2014, mengapa terjadi perubahan afiliasi politik Fatayat NU Cabang Surabaya ke partai politik yang berideologi nasionalis di dalam Pemilihan Umum 2014, dan implikasi-implikasi dari adanya perubahan afiliasi tersebut.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Civil Society

Istilah *civil society* (masyarakat sipil) dapat diterjemahkan sebagai sebuah wilayah publik (*public sphere*). Sebagai wilayah diantara negara dan pasar, dimana muncul aksi-aksi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai. Per-definisi yang paling lunak, masyarakat sipil merupakan lembaga-lembaga yang hidup diluar institusi negara dan lembaga keluarga.[15]

Ciri yang paling menonjol untuk melihat sebuah lembaga yang merupakan bagian dari masyarakat sipil antara lain beroperasi secara independen, diluar struktur dan prosedur yang berlaku di pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Ciri lain, organisasi masyarakat sipil, pada umumnya didefinisikan sebagai lembaga-lembaga non-profit, yang tidak mencari keuntungan atau mengakumulasi kapital. Masyarakat sipil merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip kewarganegaraan. Masyarakat sipil melakukan aksi secara independen, mengidentifikasi dirinya, memberi informasi, dan mengaktualisasikan diri dalam ruang publik, untuk mengoreksi struktur, kebijakan serta perilaku negara dan pasar.[16]

Konsep masyarakat sipil (*civil society*) sendiri sebenarnya mulai berkembang di negara-negara Barat sejak abad ke-17 M, yang disebabkan karena

---

[15]Luthfi J Kurniawan, Hesti Puspitosari, dan Rima Diana Puspita, *Negara, Civil Society dan Demokrasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), h. 1.

[16]*Ibid*., h. 2-3.

adanya dominasi dan otoritarian dalam praktik kekuasaan oleh penguasa atau rezim yang berkuasa di negara-negara Barat.[17]

Konsep masyarakat sipil yang paling tua berkembang pada masa Yunani Kuno yang merujuk kepada pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, civil society (*politike koinonia*) adalah komunitas/masyarakat politik/negara. Pada saat itu masyarakat sipil lebih identik dengan negara yang didalamnya ada warga negara yang mampu mengurus diri mereka sendiri. Selain itu juga muncul konsep masyarakat sipil yang dipopulerkan oleh Markus Tullius Cicero. Cicero mengistilahkan masyarakat sipil sebagai *societas civilis*. Sama halnya dengan Aristoteles, Cicero mengartikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik.[18]

Konsep masyarakat sipil tersebut bertahan hingga abad ke-17 dan ke-18. Lalu muncul konsep-konsep dari Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke yang memandang bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat politik (negara).[19] Berbeda dengan kedua tokoh tersebut, Adam Smith memiliki pandangan yang dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Menurut Smith dikatakan bahwa keberadaan "pasar" dianggap mampu mengatur tukar menukar dengan tidak merugikan nilai kemanusiaan dan nilai politik.[20]

Sedangkan Adam Ferguson yang merupakan filosof pencerahan Skotlandia, memaparkan bahwa konsep *civil society* berhubungan dengan visi etis tentang kehidupan masyarakat yang beradab (*civilized society*). Ferguson

---

[17]*Ibid*., h. 8.
[18]*Ibid*., h. 9-10.
[19]*Ibid*., h. 16.
[20]*Ibid*., h. 11.

menggambarkan tentang tahap-tahap sejarah perkembangan masyarakat mulai dari masyarakat primitif, masyarakat pertanian, sampai masyarakat industri/modern yang mulai mengejar kepentingan secara individual dan melupakan semangat kebersamaan atau semangat publik. Dengan kondisi ini, Ferguson mengharapkan *civil society* yang baru yaitu berwujudkan semangat publik dalam bentuk solidaritas sosial antara sesama warga. Dengan adanya masyarakat yang kuat akan mampu mengimbangi peran negara agar tidak didominasi oleh negara (negara tidak menghagemoni warga).[21]

Begitupun dengan Thomas Paine (1737-1709) yang memiliki pandangan sama dengan Ferguson. Menurut Paine, posisi masyarakat harus kuat. Keberadaaan negara adalah bentukan masyarakat, sehingga posisi negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat. Apabila posisi negara lebih kuat dari masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Menurut Paine, masyarakat sipil adalah ruang dimana para warga dapat mengembangkan kepribadian dan membuka peluang bagi pemuasan kepentingan mereka.[22]

Sementara itu, Hegel dan Mark memiliki pandangan bahwa masyarakat sipil adalah merupakan produk dari borjuis. Dimana pada saat pandangan ini disampaikan kondisi perekonomian di Eropa Barat waktu itu sedang membaik. Masyarakat sudah mampu untuk membayar pajak. Dari kemampuan itu, masyarakat memiliki *bergaining* terhadap negara, dan pada akhirnya warga menuntut hak politik mereka. Namun disini, Mark menambahkan bahwa

[21] *Ibid*., h. 11-12.
[22] *Ibid*., h. 12.

keberadaan masyarakat sipil harus ada kontrol dari negara (berupa produk hukum, administrasi, dan politik) sehingga tidak berpotensi anarki dan dapat merusak dirinya sendiri.[23]

Selain dua pandangan yang disampaikan diatas, terdapat pandangan lain yang agak berbeda yaitu Gramsci dan Tocqueville yang memandang bahwa masyarakat sipil merupakan penyeimbang dari kekuatan negara. *Civil society* merupakan arena dimana berbagai ideologi bekerja dengan menggunakan hagemoni dengan tujuan agar tercapainya konsensus. Tetapi disini Gramsi melihat bahwa kemandirian masyarakat sipil dapat dipengaruhi oleh basis material sebagai faktor utama dari keberadaan masyarakat sipil.[24]

Kemudian juga muncul pandangan dari Jen L.Cohen dan Andrew Arato yang mengungkapkan bahwa masyarakat sipil dibedakan dari *political society* (kekuasaan didalamnya terdapat negara, birokrasi, partai politik, dsb) dan *economiy society* (berkaitan seputar produksi misalnya perusahaan atau korporasi bisnis). Masyarakat sipil menurut pandangan Cohen dan Arato meliputi, misalnya LSM (Lembaga Swasaya Masyarakat), Organisasi Non Pemerintah (Ornop), maupun kelompok organisasi rakyat.[25]

Sedangkan Muhammad AS Hikam yang merujuk pada pendapat Alexis de Tocqueville mendeskripsikan bahwa masyarakat sipil sebagai wilayah yang kehidupan sosial yang terorganisasi yang bercirikan kesukarelaan (*voluntery*),

---

[23]*Ibid*., h. 13.
[24]*Ibid*.
[25]*Ibid*., h. 14.

keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian (*autonomy*) yang tinggi ketika berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai hukum yang diikuti oleh negaranya.[26]

Sementara itu Eisenstadt (1995) menyatakan bahwa ada beberapa komponen penting yang harus ada dalam *civil society*, antara lain :[27]

1. Otonomi, artinya *civil society* terlepas dari pengaruh dan ketergantungan dari negara baik dibidang ekonomi, politik, maupun sosial.
2. Masyarakat memiliki akses terhadap lembaga-lembaga negara. Setiap warga negara memiliki kebebasan berpartisipasi untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, melakukan hubungan (*contacting*) dengan pejabat negara, dan menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut dan terintimidasi.
3. Adanya ruang publik yang bersifat otonom.
4. Ruang publik yang terbuka bagi seluruh warga masyarakat.

Sementara Ryas Rasyid mengungkapkan bahwa masyarakat madani tumbuh karena disebabkan beberapa faktor yaitu,[28] *Pertama*, adanya perbaikan di sektor ekonomi yakni semakin tinggi pendapatan masyarakat yang menyebabkan mereka tidak tergantung kepada pemerintah, justru pemerintah yang bergantung kepada masyarakat karena harus membayar pajak untuk mendukung kegiatan pemerintah. *Kedua*, tumbuhnya intelektualitas. Semakin intelek suatu masyarakat maka secara umum semakin memiliki komitmen untuk independen. *Ketiga*,

---

[26] *Ibid*., h. 35.
[27] *Ibid*., h. 42.
[28] *Ibid*., h. 42-43.

terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.

Scholte mengemukakan bahwa keberadaan Organisasi Mayarakat Sipil sebagai pilar demokrasi berfungsi antara lain sebagai :[29]

1. Peran pendidikan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil melalui pemberian *awarreness* rakyat terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung.
2. Organisasi masyarakat sipil dapat memunculkan isu lingkungan, hak asasi manusia dan kemiskinan yang nantinya dapat disuarakan kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Memobilisasi rakyat untuk memaksa pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan.
4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi dari akibat kebijakan yang diambil ditingkat global. Melalui fungsi akuntabilitas demokratik, Organisasi Masyarakat Sipil dapat mendorong otoritas di tingkat global agar lebih bertanggungjawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang telah diambilnya.

---

[29] *Ibid*., h. 94.

1.5.2 Patronase

Istilah patronase dalam ilmu-ilmu sosial lebih banyak dikaitkan dengan birokrasi patromonial. Dalam birokrasi patrimonial ini serupa dengan lembaga perkawulan, dimana patron adalah gusti atau juragan dan klien adalah kawula. Hubungan antara gusti dan kawula tersebut bersifat ikatan pribadi, implisit dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar tali perhubungan.[30]

Menurut Keith R. Legg, konsep hubungan tuan-hamba pada dasarnya merupakan salah satu bidang studi pada disiplin ilmu antropologi. Kemudian konsep tersebut dipinjam oleh studi ilmu politik. Inti konsep tersebut pada umumnya diterima untuk digunakan dengan ilmu politik antara lain karena pihak peminjam dapat menyadap dari saluran yang sama. Di dalam sistem politik yang sudah maju, tautan tuan-hamba disamakan dengan pengampuan oleh partai (*party patronage*), yang ditafsirkan sebagai suatu tahap perkembangan partai atau konsep tersebut digolongkan ke dalam paradigma yang sudah ada.[31]

Keith R. Legg menambahkan, hubungan tuan-hamba dalam ilmu politik merupakan salah satu bentuk hubungan antara dua orang atau hubungan tuan hamba berkenaan dengan:[32]

---

[30]Dorodjatun Kuntjorojakti, *The Political Economy Development: The Case Study of Indonesia under the New Order Government*, (unpublished Ph.D, thesis, University of California, Berkelet, 1978), h. 6.

[31]Keith R. Legg, *Tuan Hamba dan Politisi*, terjemahan oleh Affan Gaffar (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h. 8-9.

[32]*Ibid*., hal. 9-10.

1. Hubungan diantara pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama. Para pengamat biasanya menggunakan tolak ukur berupa perbandingan kekayaan, kedudukan, atau pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tuan-hamba. Pola umum tautan tuan-hamba adalah pihak hamba mendapatkan keuntungan materi, sedangkan pihak tuan menerima keuntungan simbolis, kesetiaan, dan keuntungan "politik". Uraian mengenai motivasi terjadinya hubungan tuan hamba bertitik berat pada kebutuhan pihak hamba. Namun, uraian khusus terutama mengenai tautan tuan hamba dalam bidang politik menunjukkan bahwa pihak tuanlah yang sering menjadi pemrakarsa. Pihak hamba setelah menikmati prestasi yang diberikan oleh pihak tuan baru berkewajiban membalasnya. Dalam tukar menukar, pihak hamba berkedudukan sebagai "lumbung nilai" tempat pihak tuan menyimpan kredit sosial yang dapat diambil di waktu yang akan datang demi keuntungan pribadinya.

2. Hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubungan yang sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*), hubungan yang memperibadi (*personalized relationship*), biasanya disebut dengan istilah hubungan tatap muka (*face-to-face relationships*). Hal hal tersebut dianggap sebagai syarat utama bagi terjadinya tautan tuan-hamba di dalam kepustakaan tentang tautan tuan-hamba. Menurut Lande, inti sari unsur kemesraan mengenai tautan tuan hamba adalah "pihak tuan memperlihatkan perhatian yang hampir-hampir seperti orang tua dan tanggap pada kebutuhan pihak hamba, dan pihak hamba memperlihatkan kesetiaan seorang anak kepada sang tuan". Semakin besar perbedaan status pihak-

pihak yang bersangkutan, semakin besar pulalah derajat kemesraan yang diperluhkan untuk mempertahankan kelestarian hubungan itu.

3. Hubungan yang berdasarkan saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima. Untuk mempertahankan berlakunya asas saling menguntungkan dan keuntungan timbal balik, diperluhkan perubahan syarat "penguasaan sumber yang timpang" menjadi "penguasaan sumber yang tidak dapat dibandingkan". Kekuasaan pihak tuan, menurut Freeman terutama terletak pada kekuasaannya atas sumber-sumber yang langka, dihargai, dan diinginkan oleh pihak hamba, terkadang sumber yang diinginkan oleh pihak hamba tidak menempati urutan pertama dalam skala penilaian pihak tuan.

Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Umum

Kajian patronase sering tumpang tindih dengan kajian lain yaitu klientelisme. Layaknya banyak istilah lain dalam dunia ilmu sosial, pengertian dari kedua konsep tersebut sampai sejauh ini juga masih diperdebatkan. Beberapa ilmuwan sosial bahkan menyamakan kedua konsep tersebut.

Secara konsep, merujuk pada Shefter, patronase didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi

uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).[33]

Patronase juga bisa berupa uang tunai dan barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, terdapat perbedaan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programmatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.[34]

Sementara itu, Hicken menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontingensi atau timbal balik. Pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis yaitu adanya penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien. *Ketiga*, aspek pengulangan. Pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus.[35]

---

[33]Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia* dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati ed., *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: POLGOV, 2015), h. 3.

[34]*Ibid*., h. 4.

[35]*Ibid*., h. 4-5.

Lebih jauh, perbedaan antara patronase dan klientelisme dapat diuraikan sebagai berikut. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*).[36]

Variasi Bentuk Patronase

Terdapat satu masalah utama dalam politik patronase. Pada pemilihan umum yang bebas rahasia, '*para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan*' (Schaffer dan Schedler).[37]

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian ini adalah dengan menjalankan patronase dengan cara yang sesuai nilai-nilai kultural, misalnya, membungkus pemberian sebagai amal yang mengandung sanksi religius atau sebagai kemurahan hati sosial para tokoh kaya dan terhormat harus terlibat. Para kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik patronase ini secara

[36]*Ibid*., h. 4.
[37]*Ibid*., h. 22.

langsung atau melalui bantuan perantara (broker) yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih.[38]

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam tulisannya yang berjudul Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia, telah mengidentifikasi patronase menjadi lima yakni pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivasi (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*).

1. Pembelian suara (*vote buying*)[39]

Pembelian suara adalah distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerimanya akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Salah satu istilah yang sering digunakan di Indonesia adalah 'serangan fajar'. Beberapa kandidat menjalankan praktik ini dengan sangat sistematis, mereka memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang untuk pemilih tersebut. Tetapi terdapat kecenderungan bahwa struktur *broker* seringkali membocorkan (mencuri) dana dan berbagai upaya yang dilakukan oleh para kandidat untuk mencegah terjadinya hal itu. Upaya lain adalah pembuatan target penerima, dalam artian para

[38]*Ibid*., h. 23.
[39]*Ibid*., h. 24.

kandidat memilih target spesifik, apakah para loyalis partai atau pemilih mengambang.

2. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)[40]

Pemberian pribadi kepada pemilih biasanya dilakukan oleh kandidat ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan. Kadang-kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Dalam kasus semacam ini, praktik tersebut tidak mudah dibedakan dengan pembelian suara secara sistematis.

Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda kecil (kalender, gantungan kunci yang disertai imej kandidat), pemberian berupa bahan makanan atau sembako, benda-benda kecil berupa peralatan rumah tangga terutama yang memiliki makna religius (mukena, sarung) atau peralatan rumah tangga minor (barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari plastik).

Namun demikian, sebagian besar kandidat secara tegas telah membedakan keduanya sehingga mereka tidak menganggap bahwa pembelian barang adalah bagian dari 'politik uang'. Para kandidat memaknai pembelian suara sebagai praktik yang sistematis, dengan melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh target suara lebih besar.

---

[40] *Ibid*., h. 25-26.

3. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*)[41]

Dalam variasi bentuk patronase ini, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, biasanya kandidat mempromosikan dirinya. Tidak sedikit juga kandidat yang membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat misalnya *check-up* dan pelayanan kesehatan gratis. Selain itu, banyak kandidat yang juga menyediakan bantuan personal untuk para konstituen yang memerluhkan akses kepada layanan pemerintah, misalnya membantu mereka dalam mengakses program-program beasiswa dan kesehatan pemerintah.

4. Barang-barang kelompok (*club goods*)[42]

Club goods adalah praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan pribadi. Sebagian besar *club goods* di Indonesia bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lain.

Di Indonesia, terdapat sangat banyak variasi institusi formal dan informal pada tingkatan akar rumput, seperti kelompok-kelompok keagamaan, klub-klub olahraga, asosiasi-asosiasi pemuda, kelompok-kelompok wanita, dan koperasi-koperasi pertanian. Jenis barang yang dibagikan adalah perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, *sound system*, peralatan dapur, tenda, peralatan

[41] *Ibid*., h. 26.
[42] *Ibid*., h. 27-28.

pertanian, dan sejenisnya. Kandidat juga kerap memberikan sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Dalam rangka memastikan agar para penerima manfaat memberikan suaranya, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi yang difasilitasi oleh para tokoh masyarakat sebagai *broker*.

5. Proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*)[43]

Proyek-proyek *pork barrel* adalah proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Para kandidat biasanya berjanji untuk memberikan 'program-program' dan 'proyek-proyek' yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan.

Karena itu, banyak kandidat petahana pada saat kampanye berusaha untuk meyakinkan pemilih akan keberhasilan mereka dalam menghadirkan 'program-program' tersebut. Di banyak daerah, setiap anggota DPRD kabupaten/kota maupun propinsi memperoleh dana khusus untuk tujuan-tujuan semacam ini. Biasanya dana tersebut diberi nama sebagai dana aspirasi (gagasan dari dana aspirasi adalah bahwa dalam rangka mendukung para legislator dalam aktivitas

[43] *Ibid*., h. 28-29.

penyerapan dan memberikan respon terhadap 'aspirasi' konstituen, mereka diberikan jatah beberapa proyek pemerintah).

Para caleg petahana biasanya memberikan proyek-proyek ini dengan harapan bahwa masyarakat akan mendukung mereka kembali di pemilu berikutnya. Para kandidat seringkali juga menggunakan proyek-proyek ini untuk membentuk klien. Bahkan tidak jarang mereka menarik para penerima keuntungan *pork barrel* sebagai bagian dari tim kampanye.

Bentuk lain yang perlu dicatat secara khusus adalah kandidat memberikan pembayaran kepada anggota tim sukses dan menyediakan keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya lebih klientelistik dan lebih berkesinambungan, seperti memberikan pekerjaan atau bantuan untuk mendapatkan alokasi proyek-proyek pemerintah.

Klientelisme dan Jaringan Mobilisasi Pemilih

Di Indonesia, jaringan-jaringan yang digunakan oleh para kandidat dalam rangka memobilisasi dukungan adalah penggunakaan *Broker*. *Broker* ditingkat akar rumput memainkan peran sangat vital dalam relasi antara kandidat dan pemilih. Mereka biasanya merupakan tokoh-tokoh formal, informal, atau anggota masyarakat biasa yang bekerja sama atas nama kandidat. Tugas utama mereka adalah membujuk para tetangga dan kenalan mereka untuk memilih sang kandidat.[44]

[44] *Ibid*., h. 33.

Broker memiliki posisi yang sangat penting karena semua kandidat, terutama yang berhadapan dengan konstituensi yang sangat besar, menyadari bahwa mereka sangat tidak mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilih.[45]

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kandidat yang menggunakan patronase selalu berhadapan dengan *'masalah timbal balik'*. Bagaimana mereka memastikan bahwa para penerima patronase akan membalas dalam bentuk pemberian suara? Dalam konteks ini, *broker* muncul sebagai solusi. Patronase dari kandidat mungkin tidak akan mendapatkan respons balik dari pemilih jika patronase tersebut disampaikan oleh kandidat yang tidak dikenal baik oleh pemilih. Karenanya, kandidat menyampaikan patronase kepada orang yang dipercayai oleh pemilih.[46]

Dengan demikian, para *broker* membuat patronase berfungsi lebih efektif karena mereka mampu menjamin adanya rasa terimakasih dan kewajiban untuk memilih. Secara umum, *broker* mampu menyampaikan, memonitor, dan bahkan mendesakkan kepatuhan kepada pemilih.[47]

Selain itu, salah satu cara untuk membuat patronase berjalan dengan efektif adalah membentuk relasi yang murni klientelistik. Dengan demikian, relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian dari pembentukan

---

[45] *Ibid*.
[46] *Ibid*., h. 34.
[47] *Ibid*., h. 34-35.

relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (perulangan adalah ciri penting dari klientelisme).[48]

Tiga bentuk dasar dari jaringan *broker* suara yang digunakan di Indonesia antara lain :[49]

1. Tim Sukses

Ini merupakan bentuk jaringan *broker* suara yang paling umum digunakan oleh kandidat. Tim sukses seringkali disebut dengan nama lain, misalnya 'tim kemenangan', 'tim keluarga', dan 'tim relawan'. Tim sukses biasanya bersifat personal dan berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual, meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam bentuk kampanye 'tandem'.

Gambaran dari struktur tim sukses yang terorganisir berdasarkan teritori, biasanya tim sukses untuk DPR Pusat akan menyertakan tim penasehat inti dan para asistennya yang bekerja langsung dengan sang kandidat. Dibawahnya, terdapat sejumlah koordinator kabupaten/kota, koordinator kecamatan (korcam), koordinator desa (kordes), dan terkahir adalah *broker* pada akar rumput atau koordinator lapangan (korlap). Tujuan utama dari *broker* adalah menghubungkan kandidat yang berada di puncak piramida dengan para pemilih pada level terbawah piramida. Praktiknya, *broker* pada tingkat dusun atau RT/RW membuat daftar pemilih yang bersedia memberikan suaranya kepada kandidat, memberikan

[48] *Ibid*., h. 35.
[49] *Ibid*., h. 35-40.

daftar ke struktur atasannya, membayarkan uang, dan memastikan para penerima datang ke bilik suara di hari pemilihan.

Namun, *'masalah timbal balik'* antara kandidat dan pemilih juga mempengaruhi relasi antara kandidat dan tim sukses. Kandidat biasanya sangat peduli terhadap isu-isu penggelapan, kelambanan, dan penyelewenangan yang dilakukan para *broker*. Masalah ini yang membuat kehadiran tim sukses tidak dapat menjamin realisasi dari harapan kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

2. Mesin-mesin jaringan sosial

Selain menggunakan tim sukses yang terorganisir berdasarkan teritori, para kandidat juga sering mendapatkan dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Harapannya, para tokoh ini mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat.

Para tokoh masyarakat ini seringkali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintah, misalnya dalam unit-unit pemerintah terendah seperti kepala desa, kepala dukuh, RT atau RW, atau pemimpin dari asosiasi formal, misalnya kelompok keagamaan, organisasi etnis, dan klub-klub olahraga. Para tokoh juga berasal dari para tokoh informal, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, para tetua desa, ketua-ketua kekerabatan, pemimpin adat, atau orang yang dianggap penting oleh komunitasnya.

Dengan memanfaatkan para tokoh ini, kandidat berharap mereka dapat mendorong para pengikutnya untuk mendukung kandidat tersebut. Dengan kata lain, kandidat seringkali memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada. Mereka

memanfaatkan kepercayaan sosial (*social trust*) yang ada dalam suatu jaringan agar mereka mendapatkan dukungan politik.

Dengan ini menunjukkan bahwa, struktur *broker* setidaknya menggunakan dua rute yang berbeda untuk menjangkau pemilih, yaitu melalui tim sukses (ataupun partai politik) yang terorganisir secara teritori dan melalui jaringan sosial. Kepercayaan terhadap tokoh masyakat biasanya terkait dengan distribusi pemberian *club goods*. Ketika kandidat merekrut pemimpin dari komunitas tertentu, mereka biasanya memberikan suara kolektif bermanfaat bagi komunitas tersebut.

3. Partai politik

Kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai politik dan memiliki dominasi yang tinggi di dalam partai, secara efektif mampu membuat kepengurusan di tingkatan cabang dari partai tersebut untuk menjadi tim sukses pribadinya. Selanjutnya, kandidat memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadinya. Dengan demikian, struktur partai politik kemudian cenderung diasosiasikan dengan pengurus partai yang menjadi kandidat.

Dalam sistem pemilu yang sangat kompetitif, secara umum, pengurus partai di tingkat akar rumpur menjadi terbelah kedalam beberapa faksi. Seorang kandidat biasanya akan bergantung pada beberapa pengurus di tingkat lokal, para pemimpin, dan kader partai. Orang-orang ini yang biasanya kemudian menjadi bagian dari tim sukses dari kandidat. Karena itulah, tim sukses dari seorang

kandidat yang berasal dari pengurus partai terkadang banyak diisi oleh kader partai politik.

1.6 Konseptualisasi

1.6.1 Afiliasi Politik

Afiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian (1). Pertalian atau cabang (2). Perhubungan, dan (3). Bentuk kerjasama antara dua lembaga (individu), biasanya yang satu lebih besar daripada yang lain tetapi masing-masing berdiri sendiri.[50] Kerjasama, gabungan, atau pertalian dalam hal ini adalah dengan suatu kelompok atau perkumpulan. Kelompok/perkumpulan yang dimaksud disini adalah organisasi masyarakat sipil. Jadi, afiliasi politik adalah bergabungnya atau bekerjasamanya organisasi masyarakat sipil dengan partai politik terkait kepentingan di bidang politik. Afiliasi politik ini dapat dilihat dari intensitas atau frekuensi dukungan yang diberikan kepada partai politik.

1.6.2 Pemilihan Umum

Pemilu pada hakikatnya merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan-badan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah, maupun Presiden dan Wakil Presiden.

---

[50]Hasan Alwi, et all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 11.

Dengan kata lain Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Rakyat dapat turut serta dalam pengambilan sebuah keputusan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap periodenya. Melalui Pemilu rakyat dapat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku, sehingga ada pemimpin baru yang memperoleh pengakuan/legitimasi dari masyarakat.[51]

1.6.3 Kelompok Kepentingan

Menurut Gabriel A. Almond,[52] kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya dan perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisisr berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama, ataupun berdasarkan issue-issue kebijaksanaan, kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama

---

[51]Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: SIC, Cetakan keempat, 2004), h.194.

[52]Gabriel Almond, *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik* dalam Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews ed., *Studi Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001), h.75-81.

karena kehidupan sehari-hari dan karir seseoranglah yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan atau tindakan pemerintah.

Tipe-tipe kelompok kepentingan antara lain adalah :

1. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatu, kelompok ini sering bertumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya.

2. Kelompok Non-Assosiasional

Seperti kelompok anomik, kelompok kepentingan non-assosiasional ini jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala. Ini mungkin berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu. Misalnya, keluhan dari delegasi informal suatu kelompok linguistik mengenai bahasa pengantar di sekolah, permintaan dari beberapa tuan tanah kepada seorang birokrat dalam suatu klub sosial informal tentang hasil pertanian dan sebagainya.

Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat belum-maju, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristrokrat mendominasi kehidupan politik, dan dimana kelompok kepentingan yang terorganisisr dan mengkhusus tidak ada atau masih lemah. Tetapi dalam negara-negara industri maju pun, kelompok non assosional

seperti keluarga-keluarga berpengaruh, tokoh-tokoh lokal atau regional, dan pemimpin–pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruh yang walaupun kadangkala lebih besar daripada pengaruh perkumpulan profesional serikat buruh, dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan sosial, pesta-pesta tidak resmi, dan semacamnya seringkali menciptakan situasi yang memungkinkan pembicaraan tawar-menawar (*bergaining*) antara pembuat keputusan dan kelompok-kelompok warganegara yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Kelompok Institusional

Organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan gereja seringkali mendukung kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan *lobbying*. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan.

Tetapi, baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu (seperti fraksi-fraksi badan legislatif, klik-klik perwira, departemen, dan klik-klik ideologis dalam birokrasi) kelompok semacam ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan institusional sangat berpengaruh akibat basis organisasinya yang sangat kuat.

4. Kelompok Assosiasional

Kelompok assosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan

yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus memakai tenaga staff profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya diatas kelompok non assosiasional, taktik, dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat dan dengan mewakili kelompok dan kepentingannya yang luas, kelompok assosiasonal dengan efektif bisa membatasi pengaruh anomik, non-assosiasional dan institusional.

Supaya efektif, kelompok kepentingan harus mampu mencapai atau berhubungan langsung dengan para pembuat keputusan politik utama. Dalam mengkomunikasikan tuntutan politik, individu-individu yang mewakili kelompok kepentingan atau dirinya sendiri biasanya tidak hanya ingin sekedar memberi informasi. Mereka bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pemimpin yang membuat keputusan yang relevan dengan kepentingan mereka, dan memperoleh tanggapain baik.

Karena itulah kelompok kepentingan berusaha mencari saluran-slauran khusus untuk menyalurkan tuntutan mereka dan mengembangkan teknik-teknik penyampaian agar tuntutan mereka itu diperhatikan dan ditanggapi. Dan saluran-saluran untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Saluran-saluran paling penting antara lain Demonstrasi dan Tindakan Kekerasan, Hubungan Pribadi, Perwakilan Langsung, dan Saluran Formal dan Insitusional Lain. Faktor yang paling mempengaruhi pemilihan penggunaan saluran untuk

mendesakkan kepentingan adalah distribusi kekuasaan efektif dalam sistem politiknya.

1.6.4 Partai Politik

Batasan partai politik menurut George B. De Huszar dan Thomas H. Stevenson adalah "sekelompok orang yang terorganisasi untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan."(*A political party is a group of people organized to secure control of a government in order to put its program into effect and install its members in office*). Sedangkan menurut Carl J. Frieddrich, partai politik adalah "sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan partainya, berdasarkan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil". (*A political party is a group of human being stably organized with the objective of secureing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective giving to members of party through such control ideal and material benefits and advantages*).[53]

[53]Suroto dan Doddy Rudianto, *Partai-Partai Politik di Indonesia* (Jakarta : PT Citra Mandala Pratama, 2003), h. 19-20.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Afiliasi Politik

Afiliasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya sebagai Organisasi Masyarakat Sipil kepada partai politik yang beridiologi nasionalis yaitu Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum 2014. Bukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik yang memiliki kedekatan hubungan dengan Nahdlatul Ulama (organisasi induk) karena merupakan partai politik yang dilahirkan oleh NU dan didaulat sebagai satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi warga Nahdliyin.

1.7.2 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki kepentingan dan dengan kepentingannya tersebut memungkinkan pembicaraan tawar-menawar (*bergaining*) dengan calon legislatif maupun eksekutif bahwa jika mereka terpilih dan mendapatkan kursi di pemerintahan, mereka akan menjadi wakil yang akan memperjuangkan kepentingan dari Fatayat NU Cabang Kota Surabaya.

1.7.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang dimaksud disini adalah Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Dapil Jawa Timur 1 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu atau yang disebut dengan *Setting Social*.[54]

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

[54]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 22.

yang tampak atau sebagaimana adanya. Ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah bersifat aktual, dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang *ade-quat*.[55]

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena ingin memberikan gambaran tentang fakta-fakta seputar Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil Studi pada Pimpinan Cabang Fatayat Nahdhatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014 sebagaimana adanya dengan diiringi interpretasi rasional yang *ade-quat*.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil, penulis mengambil lokasi di Kantor Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya yang berada di Jalan Bubutan VI. 2 Surabaya, Jawa Timur.

1.8.3 Penentuan Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan subyek penelitian melalui teknik *purposive sampling*. Dimana dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana di

---

[55]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 63-64.

dalam *accidental sampling*. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.[56]

Oleh karena itu, subyek penelitian dari skripsi yang berjudul Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil Studi pada Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdhatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014 antara lain, (1). Ketua Umum Fatayat NU Cabang Kota Surabaya Periode 2009-2014 yaitu Ibu Madaniyah Manshur, S.Ag (2). Ketua II yang membawahi bidang Hukum, Advokasi, dan Politik periode 2009-2014 yaitu Dra.Hj. Nor Qomariyah (3). Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan periode 2009-2014 yaitu Ibu Musfiqoh, MEI, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU Cabang Kota Surabaya periode 2014-2019 (4). Wakil Sekertaris periode 2009-2014 yaitu Ibu Nur Rohmatul Izzah, ST, dan (5) Wakil Bendahara periode 2009-2014 yaitu Ibu Hudiyah, SE.

[56] *Ibid*., h. 157

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam mengumpulkan dan menggunakan dua macam cara pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Dikumpulkan melalui dua macam cara, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar (menurut Ryerson yang mengklasifikasikan observasi menjadi enam metode). Observasi terus terang atau tersamar adalah suatu etika penelitian ilmiah yang menginginkan penelitian dilakukan secara terbuka. Penelitian dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti.[57]

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik

[57]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *op.cit*., h.119.

dan jelas dari informan.[58] Untuk penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap adalah wawancara yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja datang berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, tetapi dalam kurun waktu tertentu, peneliti bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan pokok. Istilah lain dari bertahap bisa disebut juga wawancara bebas terpimpin atau terarah, yaitu wawancara dengan merujuk pada pokok-pokok wawancara.[59] Tentunya dalam menggunakan teknik wawancara ini peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam dokumen tertentu seperti buku, majalah, surat kabar, film, foto, maupun hasil penelitian orang lain seperti artikel, berita, media massa, karya ilmiah, hasil seminar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dari buku atau bahan-bahan tulisan, artikel, berita di surat kabar, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian terkait dengan Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada Organisasi

[58] *Ibid*., h.130.
[59] *Ibid*., h.131.

Masyarakat Sipil Studi pada Pimpinan Cabang Fatayat Nahdhatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan memalui tiga alur, yaitu:[60]

1. Reduksi Data

Pertama-tama dilakukan identifikasi terhadap unit/bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit tersebut dengan tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya.

Operasionalisasi reduksi data dapat ditelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperluhkan.

---

[60] *Ibid*., h.96-100.

2. Display Data

Bagian-bagian data yang memiliki kesamaan dipilah dan diberi label (nama). Operasionalisasi mengkategorikan data dengan cara data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk membuat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Setiap kategori yang ada dicari kaitannya kemudian diberi label (nama).

3. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian (*decomposition*), sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu diurai itu tampak dengan jelas dan karenannya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu. Kesimpulan dapat berupa deskripsi, hubungan kausal, hipotesis, konsep atau teori. Pada bagian kesimpulan, peneliti hanya merangkumkan pokok-pokok yang menarik saja karena hal-hal yang muncul pada bagian ini secara eksploratif sudah muncul pada bagian isi.

1.8.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan keabsahan data melalui[61] :

1. Kredibilitas (Validitas Internal)

   Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui :

a. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan.

b. Pengamatan secara terus-menerus.

c. Trianggulasi, baik metode dan sumber untuk mencek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, dilakukan untuk mempertajam analisis kita terhadap hubungan sejumlah data.

d. Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian.

e. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, *copy*-an, dll.

f. *Member check*, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

2. Transferabilitas

   Bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca

---

[61] *Ibid*., h.100-101.

laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

3. Dependabilitas dan Conformabilitas

Dilakukan dengan *audit trail* berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.